



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 03
Provinsi : Sulawesi Utara
Pimpinan Sidang 1 : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D
Pimpinan Sidang 2 : Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D
Notulis Aplikasi : Malidya Puspita Ayu, S.T., M.Par
Notulis Offline : Annisa Sahira Firdaus, S.PWK
Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara	2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2. Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
3. Dinas Kesehatan Sulawesi Utara	3. Kementerian Kesehatan	3. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Dinas Peternakan Sulawesi Utara	4. Kementerian Pertanian	4. Direktorat Pangan dan Pertanian
5. Dinas Peternakan dan Pertanian Sulawesi Utara	5. Kementerian Perhubungan	5. Direktorat Perumahan dan Permukiman
6. UPTD Persampahan Sulawesi Utara	6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	6. Direktorat Pengairan dan Irigasi
		7. Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana
		8. Direktorat Transportasi
		9. Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	01 - Pembangunan jalan Manado Outer Ringroad (MORR) III Tahap 4	2.6	2.6	Km	Kota Manado	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Catatan sesuai rakortek		-		-					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	02 - Pembangunan Jembatan Tololui Supit	40	40	meter	Kota Manado	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA**

		Catatan sesuai rakortek	-	-					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	03 – Pembangunan Bendungan Sawangan	1	1	paket	Kab. Minahasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>Diakomodir,</p> <p>Dalam bentuk pelaksanaan studi dan model tes untuk kesiapan desain dan sertifikasi pembangunan bendungan sawangan</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Bappeda Sulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usulan yang dibuat dan disepakati dalam Rakor dengan BWS Sulawesi yang dilakukan sebelum Rakortek, bersama dengan dinas terkait, menyepakati Berita Acara dan BATS yang dimasukkan dalam Rakortekrenbang. Banjir Manado disebabkan 5 sungai besar, salah satunya adalah Sungai Sawangan yang menyatu dengan Sungai Tondano. Sungai Tondano sudah sedikit bisa dikendalikan karena sudah ada Waduk Kuwil Kawangkoan. Kota Manado yang dibagian hilir masih sedikit terancam ketika curah hujan tinggi. Masih ada beberapa yang tergenang yang disebabkan oleh Sungai Sawangan 	<p>SSPSDA, Kementerian PUPR;</p> <ol style="list-style-type: none"> RC Belum siap; sehingga 2025 masih model test dan penyiapan tahap teknis. RC-nya masih berlanjut Kemungkinan desain dan sertifikasi baru bisa di 2026, rencananya tahun 2025 usulan studinya diselesaikan Nomenklatur usulan disesuaikan menjadi □ Studi Pembangunan Bendungan Sawangan (Model Test yang sudah masuk tahap teknis) 			<p>Dit. SDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepakat dengan PUPR 					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA

		4. Telah disepakati untuk melakukan studi review Bendungan Sawangan dengan BWS Sulawesi tahun 2024							
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
4	04 – Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Tondano, Sungai Sario dan Sungai Tikala	1	1	paket	Kota Manado	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Sesuai catatan rakortek	-		-						
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	05 – Pembangunan TPST Regional Mamitarang	1	1	paket	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir, namun perlu untuk dikawal untuk PKS dan lainnya		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional				
		Catatan dan Tanggapan							
Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas						



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		<p>Bappeda</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lokasi berdampingan dengan TPA Regional Mammitarang dan melayani 4 kab/kota untuk sementara yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa2. Kendala lahan namun sudah disiapkan 10 Ha oleh Provinsi, sehingga tidak menjadi masalah3. Daerah perlu mengedit Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dan sudah disanggupi oleh Dinas PU karena sebenarnya hanya memasukkan TPST saja didalamnya (nomenklatur).4. PKS untuk TPA bisa dipakai untuk TPST, mungkin bisa memberikan PKS yang sama kepada balai5. Pemda berharap ada <i>shortcut</i> untuk perubahan nomenklatur PKS nya agar bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Karena sebenarnya lokasinya sudah aman dan kelembagaannya sudah sangat siap, dan sampah memang menjadi isu yang strategis juga. Diharapkan ada kemudahan dari direktorat cipta karya. <p>UPTD Persampahan Sulut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan	<p>Di ren CK, Kemen PUPR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan RC seperti DED, <i>dokling</i> perlu <i>update</i> dari Balai2. Lahan bersebelahan perlu dipastikan kapan diverifikasi dan siap, perlu memberikan <i>timeline</i> untuk verifikasi lahan <p>Dit SSPIP, Cipta Karya, Kemen PUPR:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usulan di aplikasi SIPA sudah masuk dan dibahas di Konreg PUPR dan menjadi kesepakatan2. Mengharapkan PKS diselesaikan dulu, karena PKS yang lama masih PKS TPA. Sedangkan ini PKS TPST akan ada perbedaan, dan disepakati dengan kepala daerah terkait3. Anggaran masih dihitung dan disesuaikan kembali4. Yang paling penting adalah 4 pemda sepakat untuk pengelolaan yang tadinya TPA menjadi TPST sehingga jelas untuk lembaga pengelolannya. Selama bisa dipenuhi, maka bisa diakomodir <p>BPPW Sulawesi Utara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen RC, DED dari BPPW Sulut sudah selesai 90% tinggal finalisasi2. Lahan masih perlu dikoordinasikan dengan PU Provinsi3. Terkait PKS, surat minat dan dokumen teknis lainnya perlu untuk disiapkan	<p>Dit Perkim, Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usulan sudah ada dalam daftar kebutuhan anggaran tahun 2025 Kementerian PUPR, namun statusnya masih menunggu keputusan final internal PUPR karena keterbatasan anggaran.2. Bisa diterima			
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
6		1	1	paket	Kota Manado	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

06 – Optimalisasi IPAL Kawasan Boulevard Manado	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
	02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
	Program	Kegiatan		KRO		RO		
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak		Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		
	Catatan dan Tanggapan							
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Sesuai catatan rakortek								
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
7	07 – Peningkatan SPAM Kota Manado	1	0	paket	Kota Manado	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak, Diarahkan menggunakan Inpres Air Minum dengan nomenklatur diubah menjadi Perluasan SPAM Manado	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut		Prasarana Bidang Konektivitas Laut			Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang
		Catatan dan Tanggapan						
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Bappeda Sulut: 1. Maksud usulan ini adalah penggantian pipa yang sudah lama, jadi lebih ke revitalisasi (peremajaan) karena idle capacitynya sudah cukup besar 2. Ada penambahan SR karena dilayani PDAM Manado dan swasta (PT Air), sekarang sudah dikelola semua PDAM		Dirjen CK, Kemen PUPR 1. Sudah dibahas di rakortek, aset sudah diserahkan ke PDAM, namun ketentuan untuk optimalisasi jaringan adalah harus aset pusat atau belum diserahkan ke Pemda 2. Apabila usulan Pemda hanya penggantian pipa saja, tidak bisa melalui diakomodir reguler, namun bisa melalui inpres dengan		Dit Perkim, Bappenas 1. Sudah masuk ke longlist kegiatan PUPR TA 2025 2. Butuh kesiapan RC dari Pemda 3. Capaian 12% penyediaan jaringan perpipaan sehingga butuh peningkatan pelayanan Dit PPP, Bappenas				



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		3. Ada penambahan SR karena dilayani PDAM Manado dan swasta (PT. Air) dan sekarang sudah dikelola semua oleh PDAM	penambahan SR tidak hanya penggantian jaringannya saja 3. Nomenklatur diubah menjadi Perluasan SPAM Manado bukan peningkatan, karena yang ditargetkan di SR nya bukan penggantian pipa Direktorat Air Minum, Kemen PUPR 1. Manado sudah menguruskan inpres Air Minum, dan beberapa sudah diakomodir sehingga Pemda perlu review kembali mana yang diakomodir inpres mana yang belum BPPW Sulut 1. Manado sudah mengusulkan inpres air minum dan beberapa sudah diakomodir sehingga Pemda perlu review kembali mana yang diakomodir inpres, mana yang belum	1. Dari yang sudah diterima, ada usulan yang sama terkait pengembangan SPAM di Kota Manado tapi sumber pendanaannya adalah pinjaman daerah. Perlu konfirmasi apakah ruang lingkup yang sama atau saling melengkapi □ Perlu di cek kembali					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	08 – Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bantuan BSPTS	1,500	1,500	unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Pertanian	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Sulut 1. Sudah dibahas di rakortek dan sudah diusulkan dalam konregrenbang, dan sudah dibahas oleh PU juga. Yang masuk ke RC adalah lokasinya di mana karena usulannya ada		BPIW, Kemen PUPR: 1. Sudah dibahas dan perlu penginputan ke aplikasi siberu 2. Perlu koordinasi dengan BPIW Sulawesi		Dit Perkim, Bappenas 1. Bisa diakomodir, namun perlu di cek kembali apakah sudah ada list <i>by name by address</i> , kesiapan RC			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		<p>banyak dan itu sudah dipenuhi dalam Geotagging</p> <p>2. Mengusulkan Pemda perlu akses ke Si baru untuk reviewing usulan daerah yang diusulkan walaupun pemda tidak bisa mengubah isinya</p>							
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	09 – Pembangunan Rumah Susun	4	3	Tower	Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Bolaang Mangondow Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir, Hanya untuk rusun ASN (termasuk Nakes) sebanyak 3 Tower		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja (PEN)				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Bappeda Sulut</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi dan geotagging sudah disesuaikan di wilayah daratan dan kabupaten kepulauan Rusun diperuntukkan untuk ASN (Talaud), STIK (Talaud), Nakes (Bolmut), dan Sangihe Perlu diklarifikasi untuk rusun di STIK apakah untuk mahasiswanya atau untuk dosennya yang merupakan ASN 		<p>Balai Perumahan Sulut, KemenPUPR</p> <ol style="list-style-type: none"> Kematangan lahan sudah lengkap dan RC sedang dimatangkan dan siap dimasukkan ke aplikasi Sibaru Sudah koordinasi dengan pemda kabupaten terkait. Kesiapannya perlu untuk pengecekan oleh tim teknis terkait dengan RC dan Perlu 2 RO berbeda untuk ASN dan pendidikan, dapat diakomodir untuk yang ASN saja Untuk rusun pendidikan (STIK di Talaud) belum bisa diakomodir karena perlu direktif dan rekomendasi 		<p>Dit Perkim, Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none"> Lahan perlu <i>clean and clear</i> Business plan perlu untuk disiapkan Perlu 2 RO yang berbeda rusun untuk ASN dan mahasiswa/siswa sekolah tinggi, yang terdaftar adalah dapat diakomodir Rusun mahasiswa belum bisa diakomodir, karena perlu ada penugasan, direktif dan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Sehingga yang bisa diakomodir adalah Rusun untuk ASN (termasuk Nakes) 					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

10	10 – Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Bangka	1	1	paket	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Perhubungan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Prasarana Bidang Konektivitas Laut		Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kupang			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Sesuai catatan rakortek									
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	11 – Pengadaan Benih Jagung	600	600	ton	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Pertanian	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Pembenihan Tanaman Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Benih sumber jagung yang dihasilkan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Sesuai catatan rakortek		-		-					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	12 – Pengadaan Benih Padi	250	250	ton	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Pertanian	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA**

		02 Transformasi Ekonomi	02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan				
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Pembenihan Tanaman Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Benih sumber padi yang dihasilkan			
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		Sesuai catatan rakortek	-	-				
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	13 – Pengadaan Alat Ultrasonografi 4 Dimensi	192	40	unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Kesehatan	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 Transformasi Sosial		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 Kesehatan Untuk Semua		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Dukungan pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	Sarana Bidang Kesehatan	Alat kesehatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (IsDB)			
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
Dinas Kesehatan, Sulut:		Kementerian Kesehatan		KGM, Bappenas				
<ol style="list-style-type: none"> Saat ini seluruh puskesmas sudah memiliki USG, sehingga untuk usulan alat bisa diusulkan ke rumah sakit Usulan jumlah disesuaikan menjadi 40 unit USG 4 Dimensi ditujukan untuk dipenuhi melalui belanja KL Kemenkes, namun untuk alat unggulan termasuk KIA. 40 unit dapat di detailkan sebarannya di RS mana saja Setiap kabupaten/kota di Indonesia akan dipetakan layanan unggulan 		<ol style="list-style-type: none"> Perlu koordinasi dengan unit utama dan pencatatan aset dengan ketentuan yang ada 		<ol style="list-style-type: none"> Konfirmasi sementara: terkait dengan alat kesehatan yang ada di rumah sakit, mekanismenya akan dipenuhi melalui belanja K/L di Kemen Kesehatan yang sebelumnya DAK. Namun alat kesehatan yang akan dipenuhi melalui belanja K/L ini adalah alat yang berhubungan dengan layanan unggulan yaitu KJSU, KIA Kontekstual USG 4 Dimensi diarahkan untuk KIA 				
Dengan catatan:								
<ol style="list-style-type: none"> Diakomodir secara bertahap Pengecekan lokasi Koordinasi dengan unit pusat aset manajemen Pengecekan RS yang belum memenuhi standar minimum 								



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		<p>dan dipenuhi standar secara bertahap (tidak semuanya di TA 2025) hingga 2029</p> <p>4. Pemenuhan yang didukung pusat adalah rumah sakit yang belum memenuhi standar minimum</p> <p>5. Diakomodir secara bertahap dengan pengecekan lebih lanjut kebutuhan sesuai standar yang berlaku</p>		<p>3. 40 unit kebutuhan ini dapat di detailkan sebarannya di RS mana saja □ RSUD semua kab/kota, rumah sakit rujukan regional dan provinsi, sehingga tidak hanya 1 yang dibutuhkan</p> <p>4. Diakomodir, namun perlu pengecekan data lebih lanjut sesuai standar yang berlaku; rumah sakit mana saja, jumlah eksisting yang tersedia sudah berapa, dsb</p> <p>5. Di setiap kabupaten/kota di Indonesia akan dipetakan layanan unggulan dan dipenuhi standarnya secara bertahap sampai 2029 sehingga pada prinsipnya diakomodir dengan pengecekan lebih lanjut terkait detail dari usulan tsb</p> <p>6. Pemenuhan yang akan didukung oleh pusat prioritas ke RS yang belum memenuhi standar minimum. Ketika ada kebutuhan lebih dari itu, diarahkan kemandirian dari daerah. Jadi belum pasti 40 unit di semua RS akan dipenuhi, jadi perlu di detailkan usulannya</p>				
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
14	14 – Pengadaan Bibit Ternak Babi	3000	3000	ekor	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Pertanian	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Hewan		Ternak Lainnya		



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Usulan	Catatan dan Tanggapan				Hasil Kesepakatan	
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		Sesuai ca tatan ra kortek	-	-			
15	15 – Penataan Wisata Alam Pulau Likri Minahasa	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
		1	1	Kawasan	Kab. Minahasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Agenda Pembangunan	Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi	01 Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju		11 Stabilitas Ekonomi Makro		
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Ruang Kreatif yang Di-aktivasi		
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Bappeda Sulut: 1. Semua sudah terpenuhi dan sudah pernah ada studi, karena di Danau Tondano sudah pernah ada beberapa penataan kawasan 2. Dibahas lebih lanjut dengan perubahan KL 3. Usulan ini berbeda dengan usulan Mangrove Park 4. Usulan ini merupakan bagian dari proyek besar untuk penataan Danau Tandano 5. RC sudah disampaikan ke PUPR	BPIW PUPR: 1. Belum pernah dibahas di kongreg dan rakorbangwil PUPR CK PUPR: 1. Belum terinfo dari forum sebelumnya, yang ada hanya pembangunan mangrove park di Manado 2. Belum mendapatkan RC nya 3. Setuju dengan Dit Perkim, sudah pernah ditangani di sekitar danau tandano di tahun 2023 sehingga belum jadi prioritas karena sudah pernah ada penanganan 4. Perlu untuk dikonfirmasi dahulu apakah ini merupakan satu kesatuan BPPW Sulut: 1. Belum ada info dan arahan terkait usulan ini		Dit Perkim, Bappenas 1. Perlu disesuaikan dahulu KL-nya 2. Usulan ini tidak mendukung capaian akses hunian layak huni dan berkelanjutan 3. Tidak ada usulan ini di pagu indikatif, mungkin bisa di drop dahulu 4. Perlu ada pembahasan dengan BPPW dan Balai untuk diusulkan di tahun berikutnya		

Diakomodir

Dialihkan
Kemenprekraf ke
Dirjen CK, KemenPUPR



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

			PKP, Kementerian PUPR: 1. 2021 pernah ada pengembangan kawasan di Tondano dan DED di Pulau Likri, namun belum dikembangkan karena kekurangan dana 2. Pemda dapat menyampaikan informasi delineasi Pulau Likri dan Anggarannya					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
16	16 – Pengadaan Bibit Ternak Sapi	1,500	0	ekor	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kota Tomohon	Kementerian Pertanian	Ditolak, perubahan pengusulan menjadi ternak potong di Minahasa dengan anggaran bertahap	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi			Arah Pembangunan Nasional			
02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju			16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
Program		Kegiatan		KRO		RO		
Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi pangan Berkualitas		Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		Bantuan Hewan		Ternak Ruminansia Potong		
Catatan dan Tanggapan								
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Sulut: 1. Diusulkan 1,500 ekor untuk kabupaten/kota 2. Proposal telah diinput pada aplikasi e-proposal Kementerian Pertanian Dinas Perternakan Sulut: 1. Minahasa jadi salah satu lokasi prioritas Distanakda, Prov Sulut		Kementan 1. Lokasi belum merupakan prioritas 2. Kalau memang misalnya mau dilanjutkan, nomenklturnya perlu untuk dirubah. Kita tidak ada RO bibit ternak sapi, adanya ternak sapi potong 3. Kementan ketika dirakor tekrenbang dengan anggaran 29T. Namun pagu indikatif 8T. Untuk operasional pendidikan 3,5T. Jika diakomodir, anggarannya tidak bisa memenuhi			Dit PP, Bappenas 1. Setelah dicek di krisna renja 2025, ternyata untuk prov. Sulut diusulkan pengadaan ternak sapi belum masuk ke lokasi prioritas kementan 2. Kab Bolmong, Minahasa, Minut, Bolmongut dan Tomohon) belum masuk prioritas 3. Apa bila dari Kementan belum masuk kawasan yang dimaksud,			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA**

		1. Kab Minahasa merupakan sumber bibit ternak sapi berdasarkan Kementan, sehingga dapat di pertimbangkan untuk bibit ternak sapi			ma ka belum bisa diakomodir. Yang bisa diakomodir baru untuk ternak babi				
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
17	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	1	0	Lokasi	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 Transformasi Sosial		05 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Sesuai catatan rakortek		1.							
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	17 – Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM	1	0	Lokasi	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kewirausahaan, Usaha Makro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota			
		Catatan dan Tanggapan							
Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas						



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		<p>Bappeda Sulut;</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah dibahas di rakortekrenbang, Pemda perlu untuk melampirkan RC sesuai permenkop PS, DED, 3D, RAB sarpras dan kelembagaan sudah diupload semua <p>Diskop UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada 2023 sudah mengusulkan secara lengkap untuk di Minahasa Utara RC sudah lengkap dan usulan ini menunjang KEK Likupang 	<p>Kementerian UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> Arah kebijakan 2025 masih on progress, menunggu tema seperti apa. Ditolak terlebih dahulu tahun 2025, tapi tidak menutup kemungkinan bisa diusulkan kembali melalui pendanaan DAK fisik tahun 2025 	<p>Dit PUKMK, Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none"> Dari 2022-2024 untuk pembangunan PLUT maupun revitalisasi difasilitasi melalui DAK Tematik Belum ada rencana DAK dan rancangan kebijakan Untuk usulan Sulut mengusulkan untuk ditolak, karena tidak bisa difasilitasi belanja K/L. Apa bila skema DAK 2025 sudah jelas, bisa diusulkan oleh Pemda melalui DAK 					
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	Pembangunan IPAL Sitaro	1	0	Paket	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Sesuai catatan rakortek									
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Pengadaan Early Warning System	3	3	Paket	Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Diakomodir, Diarahkan dengan anggaran IDRIP dan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA**

		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Iokasi di Sulawesi Utara. Untuk K/L tetap BNPB		
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Ketahanan Bencana	Peringatan Dini	Bantuan Peralatan / Sarana	Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana		
		Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bappeda Sulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPBD menolak, namun BMKG menerima Pemda butuh perubahan K/L yang bertanggung jawab <p>BPBD Sulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> EWS tsunami pada tahun 2023 sudah diusulkan diterima namun diarahkan ke BMKG EWS tsunami berbentuk Toa yang berbunyi untuk peralatan dini adanya tsunami. Lokasi di Kab. Minahasa Utara dan Kota bitung Yang kami dapat dari IDRIP adalah WRS Neogen EWS toa baru ada 2 unit di Kab. Minahasa Utara 2023 Pemda mengusulkan 10 unit ke Bappenas dan tersebar di Kabupaten/Kota 		<p>TRPPB Bappenas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu kejelasan alat yang diusulkan karena beragam alat EWS yang ada Ada pinjaman IDRIP dan hampir semua provinsi dengan potensi tsunami sudah mendapat bantuan Untuk WRS dan EWS dapat bantuan pinjaman dari IDRIP bukan APBN 			
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSJ DR.V.L Ratumbuang	1	0	Paket	Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Kesehatan	<p>Ditolak,</p> <p>Kemungkinan akan dipenuhi melalui DAK Fisik Kesehatan</p>
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 Transformasi Sosial		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 Kesehatan untuk Semua	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana Bidang Kesehatan	Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur (rujukan)		



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		Dinas Kesehatan Sulut: 1. Usulan terdiri dari pembangunan lanjutan RSJ dan pemenuhan alkes dan penunjang infrastruktur dengan nilai 25M 2. RSJ sudah operasional namun masih membutuhkan gedung operasional 3. Prioritas KJSU, KIA, dan infeksi merupakan kebijakan transformasi kesehatan di Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan 1. Usulan bisa dipenuhi apabila sesuai dengan arah kebijakan dan menu DAK Fisik Kesehatan	KGM, Bappenas 1. Secara mekanisme akan melalui DAK kesehatan dengan menu peningkatan sarana prasarana 2. Pengusulan melalui DAK fisik dengan estimasi di akhir Mei 24 Menu masih ada namun untuk lokasi prioritas belum bisa dipastikan, menggunakan data ASPAC dan akan dipenuhi hingga 2029 3. Pemda diharapkan dapat melampirkan data dukung untuk pemenuhan lokasi prioritas 4. RSJ tidak menjadi menu khusus, masuk ke reguler yaitu peningkatan layanan rujukan reguler secara umum				
No.	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
22	Pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan fasilitas lainnya di RS Manembo Nembo Tipe C Bitung	1	0	Paket	Kota Bitung	Kementerian Kesehatan	Ditolak, Kemungkinan akan dipenuhi melalui DAK fisik kesehatan	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		Transformasi Sosial		Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		Kesehatan untuk Semua		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Sarana Bidang Kesehatan			Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR – 11)
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA

	<p>Dinkes Sult:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usulan terdiri dari pembangunan lanjutan RS dan pemenuhan akses dan penunjang infrastruktur dengan nilai 25M2. RSJ sudah operasional namun masih membutuhkan gedung operasional3. Prioritas KJSU dan infeksi merupakan kebijakan transformasi kesehatan4. Rumah sakit bitung bisa dipertimbangkan karena merupakan penunjang kawasan super prioritas	<p>Kemenkes;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saat ini masih menunggu arah kebijakan dan menu yang menjadi tindak lanjut arah kebijakan DAK tsb2. RSJ untuk rumah sakit unggulan	<p>KGM, Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Secara mekanisme akan melalui DAK Kesehatan, di DAK Kesehatan masih memplotkan peningkatan kapasitas untuk sarpras dan alat kesehatan untuk RS reguler dan RSJ. Tapi dengan pengajuan DAK Fisik estimasi di akhir mei2. Menu masih ada namun untuk lokasi prioritas belum bisa dipastikan menggunakan data ASPAC, dan akan dipenuhi hingga 20293. Pemda diharapkan dapat melampirkan data dukung untuk pemenuhan lokasi prioritas4. Bukan tidak ada menu RSJ, tapi RSJ tidak menjadi menu khusus tapi menu reguler. Beda dengan KJSU KIA yang merupakan menu khusus	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Direkomendasikan	15
Tidak Direkomendasikan	7
Tidak Terbahas	0